



MENINGKATKAN PENDIDIKAN MELALUI UNITED NATIONS ORGANIZATION DAN HAK ASASI PENDIDIKAN

Hartana, I Gede Yoga Esa Mahendra

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, yoga.esa@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2020

Diterima: 1 Agustus 2020

Terbit: 1 September 2020

Keywords:

United Nations,
Education, Human Rights

Abstract

Rights exercised in different educational systems and different learning settings constitute a human rights-based understanding of quality education. This study seeks to elucidate the goals and background of human rights education, national and international initiatives, and in particular the role of the United Nations in this regard. This study seeks to elucidate the goals and background of human rights education, national and international initiatives, and in particular the role of the United Nations in this regard. The method of conducting this research is the Literature Survey or Literature Survey method, and in this survey data collection activity is carried out by taking notes, reading activities and processing the survey data. UNESCO plays a central role in the design, implementation and evaluation of projects under the United Nations Decade of Action for Human Rights Education. This is done through the organization's many years of experience in teaching, human rights-based educational methods, and through the UNESCO network of schools, associations and educational institutions. Department of Human Rights and National Commissions. This international organization is responsible for promoting human rights education and is the principal organizer of the United Nations Decade of Human Rights.

Kata kunci:

United Nations,
Pendidikan, Hak Asasi
Manusia

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Hak yang dilaksanakan di berbagai sistem pendidikan serta di berbagai lingkungan belajar merupakan pemahaman Pendidikan yang berkualitas didasarkan pada Hak Asasi Manusia. Dalam studi ini kami ingin mengembangkan tujuan dan latar belakang pendidikan HAM dan prakarsa nasional dan internasional khususnya peran UNO dalam hal ini. Dalam studi ini kami ingin mengembangkan tujuan dan latar belakang pendidikan HAM dan prakarsa nasional dan internasional khususnya peran UNO dalam hal ini. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau studi literatur dimana dalam penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan mencatat dan membaca dan melakukan olah data penelitian. UNESCO memainkan peran sentral dalam desain, implementasi dan evaluasi proyek di bawah Rencana Aksi Dekade PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia, pengalaman panjang Organisasi dalam pendidikan, metodologi pendidikan yang dilandasi atas hak asasi manusia dan melalui jaringan UNESCO sekolah, klub, Ketua HAM dan Komisi Nasional. Badan internasional ini memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pendidikan hak asasi manusia, dan merupakan penyelenggara utama Dekade Hak Asasi Manusia PBB

@Copyright 2020.

PENDAHULUAN

PBB yang didirikan pada tahun 1945 atau pasca Perang Dunia II, didasarkan atas Piagam pendirian memutuskan berkaca dari keadaan perang, mereka percaya dalam rangka menyelamatkan generasi penerus di masa depan dari implikasi buruk perang, dimana perang dunia yang terjadi dua kali dalam kehidupan dunia membawa dampak penderitaan yang tidak dapat digambarkan bagi manusia sehingga dalam upaya menegaskan hak, martabat, dan harga diri manusia.¹ Majelis Umum itu memproklamkan pengajaran dan pendidikan hak asasi manusia dan penghormatan serta promosinya melalui upaya pendidikan merupakan faktor penting perdamaian dan stabilitas di dunia. Majelis umum mempercayai bahwa alat dasar yang dijadikan acuan dalam penghormatan akan hak semua orang maka diperlukan Pendidikan yang mampu mengembangkan kepribadian secara utuh.

¹ Canton, S. 2009. Mengingat Ham, Amerika. Washington: Hicks

Pendidikan mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan antara semua orang, baik ras, kelompok atau agama. Pendidikan nyatanya harus memiliki nilai-nilai luhur seperti perdamaian, non-diskriminasi, kesetaraan, keadilan, non-kekerasan, toleransi dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Dalam studi ini kami ingin mengembangkan tujuan dan latar belakang pendidikan HAM dan prakarsa nasional dan internasional khususnya peran UNO dalam hal ini. Pendidikan berbasis pendekatan hak asasi manusia berarti bahwa hak dilaksanakan di seluruh sistem pendidikan dan di semua lingkungan belajar. Dalam studi ini kami ingin mengembangkan tujuan dan latar belakang pendidikan HAM dan prakarsa nasional dan internasional khususnya peran UNO dalam hal ini.

Pendidikan hak asasi manusia bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan bahasa hak dan tanggung jawab yang diakui secara internasional yang memungkinkan siswa untuk menantang kesalahpahaman dan persepsi negatif tentang sifat dan skala hak asasi manusia secara internasional ² Pasal 26(2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara tepat "pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa kelompok ras atau agama, dan akan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian".

Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 (khususnya Bagian I, paragraf 33), Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Pendidikan, pelatihan, dan informasi publik terkait dengan hak asasi manusia diperlukan untuk memajukan dan mencapai hubungan yang seimbang dan selaras antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Mempromosikan saling pengertian, toleransi dan perdamaian, Konferensi merekomendasikan agar negara-negara berusaha untuk menghapuskan buta huruf dan membentuk pendidikan kearah pengembangan penuh akan kepribadian manusia dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Konferensi ini mengimbau semua negara dan lembaga untuk mengimplementasikan hak asasi manusia, hukum humaniter, demokrasi dan supremasi hukum dalam kurikulum semua lembaga pendidikan formal dan informal Sesuai dengan rekomendasi Konferensi Dunia, pada tanggal 23 Desember 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam Resolusi 49/184 untuk 10 periode tahunan yang dimulai pada 1 Mei 1995 untuk Dekade PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia dan bo membawa itu. rencana aksi untuk dekade yang terkandung dalam laporan Sekretaris Jenderal.

Setelah Dekade PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia (1995-2004), pada tanggal 10 Desember 2004, Majelis Umum PBB memproklamasikan Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia (2005-sedang berlangsung) untuk memajukan pelaksanaan program pendidikan hak asasi manusia di semua sektor. Tidak seperti kerangka waktu Dekade yang spesifik, Program Dunia disusun berdasarkan rangkaian fase yang berkelanjutan, yang pertama mencakup periode

²Holden, D. Cathie. 2009. *Mengajar Dimensi Global: Prinsip Kunci dan Praktik Efektif*. Routledge

2005-2009 dan berfokus pada sistem sekolah dasar dan menengah. Dikembangkan oleh kelompok luas praktisi pendidikan dan hak asasi manusia dari semua benua, Rencana Aksi tahap pertama mengusulkan strategi konkrit dan gagasan praktis untuk melaksanakan pendidikan hak asasi manusia secara nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau studi literatur dimana dalam penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan mencatat dan membaca dan melakukan olah data penelitian. Dimana dilakukan penemuan sumber primer dan skunder terkait, melalui Majalah, Buku, Koran, Jurnal maupun sumber situs Internet.

Penelitian Studi Kepustakaan meruakan penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber seperti buku, majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini terkait dengan Peran PBB, Hak Asasi Manusia dan juga Perang Palestina-Israel. Sehingga dari data mentah yang didapatkan di lapangan akan dilakukan analisis data. Dari sini akan diperoleh teori relevan yang nantinya akan didialektika untuk mendapatkan informasi secara utuh terkait dengan materi yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2022, yang dimulai dengan mengumpulkan sumber kemudian membaca dan mencatat poin terkait dengan bahasan, melakukan analisis dan penyusunan materi menjadi bentuk artikel ilmiah, berdasarkan sumber primer seperti Buku dan koran serta sumber skunder melalui situs internet ataupun majalah.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Pencarian dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku- buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen serta situs situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penyusunan karya tulis, terdapat beberapa langkah yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Pada tahap persiapan peneliti membuat kerangka berfikir yang bertujuan agar penulis lebih mudah dalam mencari informasi yang terkait sejarah sebagai upaya dalam pengimplementasian wawasan nusantara di era globalisasi. Editing adalah mengkaji dan meneliti kembali data yang sudah didapatkan kemudian dipersiapkan untuk proses pengolahan selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan editing dalam hal mencocokkan berbagai sumber-sumber relevan yang didapat melalui studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh dapat di pastikan keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memiliki sejarah panjang sebagai prioritas internasional, dan hak atas pendidikan pertama kali dicatat didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Meningkatkan pendidikan dan memastikan semua orang mendapatkan standar pendidikan yang tinggi akan ditegaskan kembali sebagai tujuan utama pembangunan global di bawah agenda pembangunan pasca-2015. Laporan sintesis UNSG baru-baru ini tentang agenda pembangunan pasca-2015 menyatakan bahwa “pendidikan berkualitas tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat” dan kapasitas guru merupakan faktor kunci dalam memberdayakan kaum

muda sebagai “mesin perubahan yang terhubung secara global” (UNSG, 2014: 21-2). Faktanya, banyak orang di seluruh dunia percaya bahwa pendidikan adalah tujuan terpenting dari agenda ini. Pada Duniaku 2015, individu dapat menentukan peringkat prioritas utama mereka untuk agenda tersebut. Lebih dari 7,6 juta orang telah memilih, dan dari enam belas potensi prioritas, penyediaan pendidikan yang baik secara konsisten menempati peringkat prioritas tertinggi di semua kohort dan telah diprioritaskan oleh lebih dari dua pertiga pemilih³

Jelas bahwa pendidikan akan tetap penting dalam agenda pembangunan pasca 2015, namun bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan dan membingkai peran pendidikan dalam memperkuat pembangunan harus dieksplorasi lebih lanjut. Untuk mempromosikan aspek-aspek ini secara efektif, tujuan pembangunan internasional pendidikan harus terus mendukung peningkatan akses dan pencapaian pendidikan. Sasaran ini juga harus berambisi dalam upayanya untuk mencapai peningkatan penting pada kualitas pendidikan untuk mengkatalisasi pembelajaran transformatif yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai sarana implementasi (MOI) yang melintasi semua SDG dan akan mendukung pencapaian keseluruhan agenda pembangunan pasca-2015, di mana pendidikan diakui sebagai salah satu pengembalian investasi jangka panjang tertinggi. dari semua tujuan pembangunan.

Perbaikan dalam pendidikan jelas membantu pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat individu, setiap tambahan tahun sekolah memperkuat potensi penghasilan individu rata-rata 10%. Pada tingkat nasional, peningkatan rata-rata pencapaian sekolah selama satu tahun menunjukkan korelasi dengan peningkatan 0,58% dalam tingkat pertumbuhan PDB nasional per kapita. Namun, peningkatan kualitas pendidikan memberikan dorongan yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan peningkatan pencapaian. Peningkatan satu deviasi standar dalam nilai tes rata-rata (menggunakan tes prestasi siswa internasional) dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan PDB per kapita 2% lebih tinggi⁴

Manfaat perbaikan pendidikan di seluruh tujuan pembangunan paling menonjol di negara-negara di mana pencapaian tujuan ini paling kurang. Sebuah studi memperkirakan bahwa pengurangan kemiskinan global sebesar 12% dapat dicapai hanya dengan memastikan bahwa semua anak di negara berpenghasilan rendah lulus sekolah dengan keterampilan dasar membaca – ini setara dengan mengentaskan 171 juta orang dari kemiskinan⁵ OECD memproyeksikan bahwa negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat menikmati PDB 28% lebih

³ Didham, R.J, Manu, P.O. 2015. *Archieving the Suistainable Development Goals: From Agenda to Action*. Hayama: Institute for Global Emviroment Strategies

⁴ EA, & Woessmann, L. (2008). Peran Keterampilan Kognitif di Pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Sastra Ekonomi*, Volume 40 Nomor 6.

⁵ Laporan Pemantauan Global EFA. (2011). *Hitungan Pendidikan: Menuju Tujuan Pembangunan Milenium*. Paris. Diambil dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf>

tinggi per tahun selama 80 tahun ke depan dengan mencapai tingkat pendidikan dasar dan keterampilan dasar untuk semua kaum muda pada tahun 2030.⁶

Sasaran MDGs dan EFA memacu upaya yang cukup besar untuk meningkatkan pendidikan secara global, dan kemajuan yang signifikan telah terjadi. Tingkat pendaftaran dan prestasi pendidikan dasar meningkat, terutama di negara-negara berkembang di mana pendaftaran meningkat dari 82% pada tahun 1999 menjadi 90% pada tahun 2010. Lebih banyak anak sekarang bersekolah daripada sebelumnya, dan di Afrika sub-Sahara saja di mana tingkat pendaftaran bersih meningkat dari 58% menjadi 76%, ini mewakili 43 juta lebih anak di sekolah. Lebih banyak anak perempuan juga bersekolah, dan paritas gender hampir tercapai dengan rasio pendaftaran antara anak perempuan dan laki-laki meningkat dari 91 pada tahun 1999 menjadi 97 pada tahun 2010 di negara-negara berkembang⁷. Kombinasi keringanan hutang dan inisiatif pendanaan memungkinkan banyak negara berkembang untuk mencapai pendidikan sekolah dasar gratis.

Namun, masih banyak tantangan. Kemajuan dalam pendaftaran telah melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan masih ada penghalang serius untuk menjangkau anak-anak yang paling kurang beruntung. Faktanya, 24% anak usia sekolah dasar di Afrika sub-Sahara dan 7% di Asia Selatan tidak bersekolah pada tahun 2010.⁸ Prioritas akses pendidikan mengabaikan isi pembelajaran dan kompetensi guru, dan faktanya masih banyak siswa menyelesaikan sekolah tanpa kompetensi dasar berhitung atau melek huruf⁹

Dalam pendidikan HAM kita dapat menemukan inisiatif nasional dan internasional. Dalam hal ini, kita dapat fokus pada kerjasama antara pemerintah nasional dan lembaga multinasional seperti United Nations Organization (ONU) dan World Program for Human Rights Education (WPHRE).

Inisiatif nasional disajikan oleh negara, di bawah lima wilayah (Afrika; Asia/Pasifik; Eropa dan Amerika Utara; Amerika Latin dan Karibia; Timur Tengah dan Afrika Utara). Pemerintah di seluruh negara berkembang telah mulai menyadari bahayanya jika tidak mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan anti kekerasan yang dipupuk melalui pendidikan hak asasi manusia, dan telah mulai mengambil langkah-langkah penting menuju cita-cita ini. Mereka tahu di tingkat lokal, nasional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang inisiatif pendidikan HAM melalui advokasi publik. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional dan Komnas HAM telah bekerja sama dengan UNESCO untuk secara aktif memperkenalkan kurikulum HAM di sekolah dasar dan menengah melalui publikasi manual dan bahan referensi tentang pendidikan HAM¹⁰, Di setiap negara departemen atau unit koordinasi yang ditugaskan oleh kementerian pendidikan,

⁶ Hanushek EA, & Woessmann, L. (2015). Keterampilan Dasar Universal: Apa negara berdiri untuk mendapatkan. Paris.

⁷ United Nations. 2012. Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2012. New York.

⁸ ibid

⁹ McArthur, JW. 2013. Miliki tujuan: Apa Milenium Tujuan Pembangunan telah tercapai. Jurnal Urusan luar negeri, Volume 92 Nomor 2, Hal 152– 162

¹⁰ Inagaki, A. 2002. Mengajarkan pendidikan HAM di Sekolah Indonesia. Jurnal Tinjauan Internasional tentang pendidikan, Vol. 48, hal.279-280

harus bekerja sama erat dengan badan-badan nasional terkait yang bertanggung jawab untuk penjabaran laporan negara kepada badan-badan perjanjian PBB, untuk memastikan bahwa kemajuan dalam pendidikan hak asasi manusia disertakan dalam laporan tersebut (Rencana Aksi paragraf 36). Menteri Pendidikan juga harus memberikan informasi tentang departemen atau unit terkait mana di Kementerian yang akan mengkoordinasikan inisiatif terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi. Setiap Negara harus memberikan informasi tentang setiap tindakan yang diambil untuk memastikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia untuk berbagai kategori profesional, termasuk guru.

Sementara secara global, Globalisasi Hak Asasi Manusia memiliki dampak positif pada pendidikan Hak Asasi Manusia karena telah menyebabkan kesadaran, koordinasi, aliran gagasan dan jangkauan yang lebih besar dari gerakan Hak Asasi Manusia internasional dan upaya pendidikannya. Pasal 29 Konvensi Hak Anak menuntut negara untuk memastikan bahwa anak-anak dimungkinkan untuk mengembangkan rasa hormat terhadap identitas budaya, bahasa dan nilai mereka sendiri dan terhadap budaya, bahasa dan nilai orang lain. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikannya sebagai pusat pencapaian hak-hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR 1948).

Organ internasional ini memproklamirkan "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum pencapaian untuk semua orang dan semua bangsa, sampai akhir bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan selalu mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan. Dewan Hak Asasi Manusia meminta Komite Penasihat untuk menyiapkan draf deklarasi tentang pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia (para. 1 resolusi 6/10 [EFSACR] berjudul "Deklarasi PBB tentang pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia"). Rencana Aksi untuk tahap pertama (2005-2009) dari Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia menyatakan semua tematik dan mekanisme negara yang relevan dari Komisi Hak Asasi Manusia (termasuk Pelapor Khusus dan perwakilan, khususnya Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia). pendidikan, serta kelompok kerja) diminta untuk memasukkan secara sistematis dalam laporan mereka kemajuan pendidikan hak asasi manusia dalam sistem sekolah, yang relevan dengan mandat mereka (Rencana Aksi paragraf 42).

Selain itu, Rencana Aksi meminta badan perjanjian PBB, ketika memeriksa laporan Negara Pihak, untuk menekankan kewajiban Negara Pihak untuk menerapkan pendidikan hak asasi manusia dalam sistem sekolah dan untuk mencerminkan penekanan tersebut dalam pengamatan akhir mereka (Rencana Aksi paragraf 41). Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa Negara terikat pada kewajiban, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan dalam instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, untuk memastikan bahwa pendidikan ditujukan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. (Paragraf 33, bagian 1 Deklarasi Wina dan Program Aksi) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan Komite Hak

Anak (CRC) telah mengeluarkan komentar umum tentang Hak atas Pendidikan (komentar umum CESCR no 13) dan Tujuan Pendidikan (komentar umum CRC no 1).

UNESCO memainkan peran sentral dalam desain, implementasi dan evaluasi proyek di bawah Rencana Aksi Dekade PBB untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia”, mengingat “... pengalaman panjang Organisasi dalam pendidikan, metodologi pendidikan dan hak asasi manusia dan melalui jaringan UNESCO sekolah, klub, Ketua HAM dan Komisi Nasional”. Badan internasional ini memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pendidikan hak asasi manusia, dan merupakan penyelenggara utama Dekade Hak Asasi Manusia PBB

UNESCO berupaya mempromosikan pendidikan hak asasi manusia melalui Pengembangan kapasitas nasional dan lokal untuk pendidikan hak asasi manusia, melalui kerjasamanya di proyek dan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Elaborasi bahan pembelajaran dan publikasi serta terjemahan dan adaptasinya di tingkat nasional dan lokal bahasa. Kegiatan Advokasi dan Jejaring. Pada tahun 2004, Majelis Umum memproklamkan Program Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia , dan proyek yang sedang berlangsung untuk memajukan pelaksanaan program pendidikan hak asasi manusia di semua sektor.

Program tersebut berusaha untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi pendidikan hak asasi manusia, untuk memberikan kerangka kerja yang konkret untuk tindakan dan untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama dari tingkat internasional sampai ke akar rumput. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Education Associates mempromosikan pendidikan hak asasi manusia dengan program mereka meyakini bahwa “belajar tentang hak asasi manusia adalah langkah pertama untuk menghormati, mempromosikan dan membela hak-hak tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan hak pendidikan yang digalakkan oleh PBB secara universal melalui landasannya akan deklarasi hak asasi pendidikan internasional dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan penting dalam agenda pembangunan pasca 2015, namun bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan dan membingkai peran pendidikan dalam memperkuat pembangunan harus dieksplorasi lebih lanjut Untuk mempromosikan aspek-aspek ini secara efektif, tujuan pembangunan internasional pendidikan harus terus mendukung peningkatan akses dan pencapaian pendidikan. Sasaran ini juga harus berambisi dalam upayanya untuk mencapai peningkatan penting pada kualitas pendidikan untuk mengkatalisasi pembelajaran transformatif yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai sarana implementasi (MOI) yang melintasi semua SDG dan akan mendukung pencapaian keseluruhan agenda pembangunan pasca-2015, di mana pendidikan diakui sebagai salah satu pengembalian investasi jangka panjang tertinggi. dari semua tujuan pembangunan

Saran

Semoga dapat bermanfaat dalam mempelajari mata kuliah hukum internasional, namun sekiranya membaca dengan berbagai sudut pandang dan referensi lain agar dapat menambah cakrawala berpikir.

DAFTAR RUJUKAN

- Canton, S. 2009. Mengingat Ham, Amerika. Washington: Hicks
- Didham, R.J, Manu, P.O. 2015. Archieving the Suistainable Development Goals: From Agenda to Action. Hayama: Institute for Global Emviroment Strategies
- Hanushek EA, & Woessmann, L. (2015). Keterampilan Dasar Universal: Apa negara berdiri untuk mendapatkan. Paris.
- Hanushek, EA, & Woessmann, L. (2008). Peran Keterampilan Kognitif di Pertumbuhan ekonomi. Jurnal Sastra Ekonomi, Volume 40 Nomor 6.
- Holden, D. Cathie. 2009. Mengajar Dimensi Global: Prinsip Kunci dan Praktik Efektif. Routledge
- Inagaki, A. 2002. Mengajarkan pendidikan HAM di Sekolah Indonesia. Jurnal Tinjauan Internasional tentang pendidikan , Vol. 48, hal.279-280
- Laporan Pemantauan Global EFA. (2011). Hitungan Pendidikan: Menuju Tujuan Pembangunan Milenium. Paris. Diambil dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf>
- McArthur, JW. 2013. Miliki tujuan: Apa Milenium Tujuan Pembangunan telah tercapai. Jurnal Urusan luar negeri , Volume 92 Nomor 2, Hal 152– 162
- United Nations. 2012. Laporan Tujuan Pembangunan Milenium 2012. New York.